

ABSTRAK

Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 telah sukses digelar, namun masih menyisakan pekerjaan rumah bagi penyelenggara (KPU) dan peserta pemilu (partai politik). Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi isu utama dalam penyelenggaraan pemilu. Perilaku *non-voting* (golput) perlu segera mendapat penanganan serius dari semua pihak. Diketahui bahwa target partisipasi yang ditetapkan KPU sebesar 77,5% secara nasional tidak tercapai. Pilwali Surabaya menempati peringkat ke tiga terbawah dengan angka partisipasi sebesar 51,34% setelah Kota Medan (26,88%) yang berada di urutan pertama dan Kab. Serang (50,84%) di urutan kedua. Perilaku *non-voting* (golput) merupakan sebuah keputusan rasional individu yang diambil atas berbagai pertimbangan dan latar belakang. Dari fenomena tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam studi ini, pertama: *mengapa perilaku non-voting (golput) di Kota Surabaya tinggi pada pilkada serentak Tahun 2015?*; Kedua, *Apa yang melatarbelakangi perilaku non-voting (golput) di Kota Surabaya pada Pilwali Surabaya Tahun 2015?*. Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 lalu menjadi media yang digunakan untuk menemukan faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat urban sehingga memilih perilaku *non-voting* (golput). Adapun tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk menjelaskan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perilaku *non-voting* (golput) masyarakat urban dalam Pilwali Surabaya Tahun 2015, memberikan masukan/rekomendasi kepada KPU mengenai langkah atau cara apa yang harus dilakukan agar dapat menekan tingginya angka golput di wilayah urban serta dapat memberikan kontribusi kepada KPU berupa rekomendasi guna meningkatkan kualitas partisipasi pemilih.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, studi ini menggunakan teori perilaku pemilih (*voting behavior*) sebagai teori dasar dalam memahami konsep perilaku tidak memilih/golput (*non-voting behavior*). Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) dipilih sebagai metode penelitian yang tepat untuk studi ini serta menggunakan metode *evidence based policy* dalam merumuskan rekomendasi yang berdasarkan atas bukti-bukti yang telah terjadi. Sedangkan Kota Surabaya dipilih menjadi tempat dimana penelitian ini dilakukan karena pertimbangan karakter daerah, komposisi masyarakat serta sejarah golput yang tinggi disetiap penyelenggaraan pemilu, serta menetapkan sembilan Kecamatan (Semampir, Pabean Cantikan, Tegalsari, Mulyorejo, Simokerto, Genteng, Krembangan, Bubutan, dan Kenjeran) yang memiliki angka golput lebih dari 50 persen sebagai lokasi penelitian dalam studi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya merupakan masyarakat urban yang memiliki karakteristik yang khas. Individual, bergerak cepat, berpikir rasional merupakan ciri dari masyarakat urban termasuk rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Perilaku *non-voting* (golput) pada Pilwali Surabaya Tahun 2015 sangat terpengaruh oleh situasi dan kondisi politik pada tahap pencalonan, panjangnya waktu pencalonan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dan minat terhadap penyelenggaraan pilwali Surabaya Tahun 2015. Berdasarkan analisa terhadap temuan dari penelitian ini, dengan berpijak pada teori perilaku memilih dan

menggunakan konsep *non-voting* (golput), terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat urban Surabaya, antara lain (1) faktor sosiologis ; (2) faktor psikologis; (3) faktor rasional (ekonomi); dan (4) faktor teknis, baik internal maupun eksternal masyarakat. Faktor tersebut itulah yang berpengaruh terhadap penentuan perilaku politik individu masyarakat urban Surabaya. Dengan diketahuinya faktor penyebab perilaku *non-voting* (golput) ini KPU dapat melakukan langkah perbaikan guna mengantisipasi terulangnya fenomena golput khususnya di wilayah urban seperti Surabaya pada pelaksanaan pemilu dimasa depan.

Bagian penutup dalam studi ini adalah rekomendasi yang disusun berdasarkan analisa temuan dengan menggunakan metode *evidence based theory* sebagai dasar pembuatan rekomendasi. Adapun rekomendasi yang diajukan adalah (1) upaya mengatasi golput yang didasari oleh faktor sosiologis: merancang sosialisasi politik yang efektif dan efisien untuk seluruh lapisan masyarakat; menggalakkan sosialisasi dengan metode *election tainment*; melakukan sosialisasi politik dengan pendekatan keagamaan dan ketokohan. (2) upaya mengatasi perilaku golput dengan alasan psikologis dilakukan dengan cara: merancang ulang waktu pelaksanaan pemilu; membuat pemilu semakin menarik dan memaksimalkan fungsi partai politik. (3) solusi untuk mengatasi perilaku golput yang disebabkan faktor rasional (ekonomi) adalah dengan meningkatkan pendidikan politik masyarakat dengan cara mengembalikan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam setiap jenjang pendidikan. Dengan adanya pendidikan politik yang berkelanjutan diharapkan bukan hanya meningkatkan partisipasi masyarakat namun juga dapat membangun filosofis akan pentingnya penyelenggaraan pemilu di negara demokratis. (4) solusi untuk mengatasi persoalan perilaku golput yang didasari faktor teknis adalah dengan, membuat TPS khusus dan strategis; mengembalikan pembiayaan kampanye pada partai politik; menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) terakhir menjadi Daftar Pemilih Sementara pada pemilu berikutnya; melakukan pemutakhiran daftar pemilih yang berkelanjutan; merancang sistem pendaftaran pemilih pemula (diberikan kepada masyarakat yang memasuki usia batas minimal pemilih yaitu 17 tahun).

Kata kunci: *non-voting* (golput), *urban politics*, masyarakat urban, Pilwali

ABSTRACT

The implementation of 2015 constituent elections has been successfully held, but still leaves homework for the organizers (KPU) and election participants (political parties). The low level of community participation is still a major issue in the implementation of the election. Non-voting behavior (golput) needs to get serious handling from all parties. It is known that the target of participation set by the KPU of 77.5% nationally is not achieved. Pilwali Surabaya is ranked the bottom three with participation rate of 51.34% after Medan City (26.88%) which is first and Kab. Attack (50.84%) in second. Non-voting behavior (golput) is an individual rational decision taken on various considerations and backgrounds. From the phenomenon, the problem formulation proposed in this study, first: why the behavior of non-voting (golput) in Surabaya City high on elections simultaneously in 2015 ?; Secondly, what is behind the behavior of non-voting (golput) in Surabaya City in Pilwali Surabaya Year 2015 ?. The election of the Mayor and Vice Mayor of Surabaya in 2015 then became the media used to find out what factors affect the gray hair so as to choose non-voting behavior (golput). The purpose of this study is to explain and identify factors that cause non-voting behavior (golput) of urban community in Pilwali Surabaya Year 2015, give input / recommendation to KPU about step or how to do in order to suppress high number of golput in urban areas and may contribute to the KPU in the form of recommendations to improve the quality of voter participation.

To explain this phenomenon, this study uses voting behavior theory as the basic theory in understanding the concept of non-voting behavior. The qualitative approach with case study method is chosen as the appropriate research method for this study and uses the evidence based policy method in formulating recommendations based on the evidence that has occurred. While the city of Surabaya was chosen to be the place where the research was conducted because of the consideration of regional character, the composition of society and the history of high golput in every election, and set nine sub-districts (Semampir, Pabean Cantikan, Tegalsari, Mulyorejo, Simokerto, Genteng, Krembangan, Bubutan, and Kenjeran) which had a goal rate of more than 50 percent as the study sites in this study.

The results showed that the people of Surabaya is an urban community that has distinctive characteristics. Individual, fast moving, rational thinking is the hallmark of urban society including rational in determining political choice. Non-voting behavior (golput) in Pilwali Surabaya Year 2015 is very influenced by the situation and the political condition at the nomination stage, the length of time of nomination to make people lose trust and interest in the implementation of Surabaya pilot in 2015. Based on the analysis of the findings of this study, behavioral theory of choosing and using the concept of non-voting (golput), there are four factors that influence the political choice of Surabaya urban society, among others (1) sociological factors; (2) psychological factors; (3) rational (economic) factors; and (4) technical factors, both internal and external societies. Factors that have an effect on the determination of political behavior of individual urban Surabaya. With the knowing factors causing non-voting behavior (golput) this KPU can perform remedial measures to anticipate the

repetition of phenomenon of golput, especially in urban areas such as Surabaya in the implementation of the election in the future.

The concluding sections of this study are recommendations based on the findings analysis using evidence based theory as the basis for making recommendations. The proposed recommendations are (1) efforts to overcome the golput based on sociological factors: designing effective and efficient political socialization for all layers of society; promoting socialization with election tainment method; through socialization of politics with religious approach and personality. (2) the effort to overcome the behavior of golput with psychological reasons done by: redesigning the time of pemilu implementation; making elections more attractive and maximizing the functioning of political parties. (3) solisi to overcome the behavior of golput caused by rational factor (economic) is by improving political education of society by way of restore civic education lesson in every level of education. Given the continuing political education is expected not only to increase community participation but also to build philosophy on the importance of electoral process in democratic countries. (4) solution to solve the problem of golput behavior based on technical factor is to make special and strategic TPS; return campaign financing to political parties; using the last permanent voter list (DPT) to become a Temporary Voters List in the next election; updating the list of sustainable voters; designing a beginner voter registration system (given to people entering the minimum voting age of 17 years).

Keywords: non-voting (golput), urban politics, urban community, Pilwali